

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH**

Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik) dalam meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku.

Dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui partisipasi warga sekolah dan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan satuan pendidikan yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 27 disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Fleksibilitas yang dimaksudkan antara lain berupa keluwesan untuk mengelola, memanfaatkan, serta memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin. Dengan demikian, diharapkan pihak sekolah dapat bergerak lebih dinamis, responsif, dan inovatif dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Implementasi MBS antara lain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab kepala satuan pendidikan, meningkatkan kompetisi sehat antar satuan pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah.

Lima Prinsip pelaksanaan MBS antara lain:

**1) Kemandirian**

Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara seperti mengembangkan unit-unit usaha sekolah, membangun kerja sama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan, pendanaan dan peningkatan program sekolah.

**2) Kemitraan**

Prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sesuai kategori sekolah. Pastikan kemitraan yang terjalin saling menguntungkan dan bersifat sejajar.

**3) Partisipasi**

Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi MBS antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Tujuan utama peningkatan partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi, memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran

pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Upaya peningkatan partisipasi di satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, publikasi sekaligus transparansi terhadap pemangku kepentingan.

#### **4) Keterbukaan**

Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk membangun keterbukaan kepada publik yaitu dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan berbagai program yang akan dijalankan serta menyampaikan laporan dari setiap program yang telah berjalan.

#### **5) Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan dimana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.

Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan sangatlah penting dalam membantu sekolah menyelenggarakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Komite sekolah dibentuk dan berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana sekolah, serta memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

## **B. KOMITE SEKOLAH**

### **1. Definisi Komite Sekolah**

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan. Komite sekolah merupakan lembaga yang mandiri dan bersifat independent, kedudukan komite sekolah tidak di bawah sekolah atau tidak di bayang-bayang kekuasaan kepala sekolah namun, kedudukan komite sekolah adalah sebagai mitra kerja kepala sekolah Menurut Abdurrahman (2022: 4). Winoto (2021:6) berpendapat bahwa komite sekolah harus dapat mengembangkan gagasan berorientasi pengguna (client model), pembagian kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) dengan fokus meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan pemahaman di atas, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang mewakili peran dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelayanan, dukungan, dan pengawasan pendidikan.

### **2. Kedudukan dan Sifat**

Di Sistem Pendidikan Nasional, komite sekolah sangat dominan. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Dengan demikian, wadah ini diharapkan untuk menggabungkan peran masyarakat dan berkonsentrasi pada peningkatan mutu pendidikan (Winoto, 2021). Menurut Departemen Agama RI (dalam

Mirhasan, 2019) mengenai pedoman komite sekolah, dijabarkan bahwa komite sekolah memiliki kedudukan pada setiap satuan pendidikan, yaitu pada seluruh jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah disekolah negeri maupun swasta. Komite sekolah ada di setiap sekolah. Komite sekolah ini adalah lembaga independen yang tidak memiliki hubungan hirarkis dengan sekolah atau lembaga pemerintah lainnya. Mereka tetap independen, tetapi bekerja sama sebagai mitra dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut penjelasan di atas, komite sekolah berada di tingkat satuan pendidikan. Komite dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang. Komite tidak terpengaruh oleh lembaga lain karena badan ini mandiri.

### 3. Tujuan

Terbentuknya komite sekolah ditujukan supaya ada organisasi masyarakat sekolah yang dapat memberikan loyalitas dan komitmen terhadap kemajuan mutu pendidikan. Winoto (2021: 7) memaparkan bahwa terdapat empat tujuan dibentuknya komite sekolah:

- a. Menggabungkan serta menyebarkan keinginan dan inisiatif komunitas dalam pembuatan kebijakan operasional dan program pendidikan sekolah.
- b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengadaan pendidikan di sekolah.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi yang terbuka, jujur, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi.
- d. Membantu SD/Madrasah dalam memenuhi standar pendidikan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan komite sekolah adalah untuk menyebarkan keinginan ataupun aspirasi dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Komite juga berusaha untuk menciptakan suasana demokratis di mana siswa dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas tinggi.

#### 4. Peran dan Fungsi

Misbah (dalam Abdurrahman, 2022) menyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga yang mewakili tugas masyarakat dan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas satuan pendidikan.

Berikut ini adalah tanggung jawab yang diberikan kepada komite:

- a. Pemberi pertimbangan, atau lembaga penasihat, yang bertanggung jawab untuk menentukan dan menerapkan kebijaksanaan pendidikan di lingkungan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) organisasi yang mendukung pendidikan secara finansial, intelektual, dan fisik.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan di institusi pendidikan.
- d. Penghubung (*mediator*) antara sekolah dan komunitas (masyarakat) dalam satuan pendidikan.

Ada empat peran penting yang dimainkan komite sekolah: pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung. Komite

sekolah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan komite sekolah mencakup ide dan sumber daya untuk mencapai program.

Hasbi (dalam Abdurrahman, 2022: 11) mengatakan bahwa komite sekolah memiliki fungsi lain selain peranan:

- a. Meningkatkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas tinggi.
- b. Berkolaborasi dengan organisasi, individu, bisnis, dan pemerintah untuk memastikan pendidikan berkualitas tinggi.
- c. Menampung dan menganalisis keinginan, konsep, permintaan, dan kebutuhan pendidikan yang beragam dari masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada satuan pendidikan tentang kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), standar kinerja satuan pendidikan, standar tenaga pendidikan, dan standar fasilitas pendidikan.

Dari beberapa penjelasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi utama komite sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dengan prinsip mendorong peningkatan kualitas akademik dan layanan belajar di sekolah. Peran dan fungsi utama komite sekolah membantu manajemen sekolah dalam mengatasi masalah finansial dan masalah lainnya.

## 5. Indikator Kinerja Komite Sekolah

Tentu dalam menentukan tolak ukur keberhasilan sebuah kinerja harus terdapat indikator-indikator yang jelas. Selayaknya dalam mengukur kinerja komite sekolah, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan oleh komite sekolah sebagai salah satu pemegang peran penting. Tabel 2.1 menunjukkan indikator kinerja komite sekolah, menurut Engkoswara & Komariah Aan, menurut Koswara (2011: 300-303). Indikator ini mencakup peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan mediator.

**Tabel 2.1 Indikator Kinerja Komite Sekolah**

<b>Peran Komite Sekolah</b>	<b>Fungsi Manajemen Pendidikan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1. Komite Sebagai badan pertimbangan	- Perencanaan Sekolah	a. Menemukan sumber daya masyarakat b. Berkontribusi dalam proses perencanaan rencana anggaran pendapatan sekolah. c. Mengorganisir pertemuan antara masyarakat dengan sekolah. d. Menanggapi perubahan rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah e. Berkolaborasi dengan Kepala Sekolah mengesahkan rencana anggaran dan belanja sekolah.
	- Pelaksanaan Program Sekolah	a. Masukan terhadap manajemen sekolah

		b. Memberi masukan terhadap proses KBM kepada guru.
	- Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	<p>a. Menemukan sumber daya pendidikan dalam Masyarakat</p> <p>b. Mempertimbangkan tenaga non guru untuk diperbantukan di sekolah.</p> <p>c. Mengkomunikasikan bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah</p> <p>d. Mempertimbangkan anggaran yang dapat digunakan oleh sekolah</p>
2. Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung	- Pengelolaan Sumber Daya	<p>a. Mengontrol tenaga pendidikan di sekolah</p> <p>b. Mengkomunikasikan dan merekomendasi kekurangan tenaga guru.</p> <p>c. Mengkomunikasikan dan merekomendasikan kekurangan tenaga non guru.</p>
	- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah	<p>a. Memantau dan mengkomunikasikan kebutuhan sarana prasarana sekolah.</p> <p>b. Memobilisasi bantuan yang dibutuhkan sekolah</p> <p>c. Mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah</p> <p>d. Mengevaluasi dukungan bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah.</p>
	- Pengelolaan Pendanaan	<p>a. Memantau dan mengkomunikasikan anggaran di sekolah</p> <p>b. Memobilisasi bantuan</p>

		anggaran untuk sekolah c. Mengkoordinasikan dukungan anggaran untuk sekolah.
3. Komite Sebagai Badan Pengontrol	- Mengawasi Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah	a. Mengawasi pengambilan keputusan kebijakan sekolah b. Mengawasi kualitas kebijakan yang diambil sekolah. c. Mengawasi proses perencanaan di sekolah d. Mengawasi kualitas perencanaan yang dibuat sekolah e. Mengawasi kualitas program sekolah.
	- Memantau Pelaksanaan Program Sekolah	a. Memantau pengorganisasian sekolah b. Memantau jadwal kegiatan sekolah c. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program d. Memantau tenaga pelaksana program sekolah e. Memantau daya dukung dari Masyarakat dan stake holder.
	- Memantau lulusan sekolah	a. Memantau hasil Ujian Sekolah. b. Memantau lulusan yang melanjutkan sekolah. c. Memantau lulusan yang tidak melanjutkan sekolah d. Memantau angka bertahan di sekolah.
4. Komite Sebagai Badan Penghubung	- Perencanaan Program	a. Menjadi badan penghubung antara Masyarakat dengan sekolah, Sekolah

		<p>dengan komite sekolah dan komite sekolah dengan Masyarakat.</p> <p>b. Mengidentifikasi aspirasi Masyarakat untuk perencanaan sekolah</p> <p>c. Membantu usulan kebijakan program sekolah.</p>
	- Pelaksanaan Program	<p>a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sekolah.</p> <p>b. Memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat untuk program sekolah.</p> <p>c. Menampung aduan, keluhan, dan saran dari Masyarakat kepada sekolah.</p> <p>d. Mengkomunikasikan aduan, keluhan dan saran dari Masyarakat kepada sekolah.</p>
	- Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan.	<p>a. Mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah.</p> <p>b. Mengidentifikasi sumber daya Masyarakat</p> <p>c. Memobilisasi bantuan untuk sekolah</p> <p>d. Mengkoordinasikan bantuan Masyarakat untuk sekolah.</p>

Menurut table indicator kinerja di atas, Komite Sekolah memiliki empat peran diantaranya: pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung atau mediator. Komite sekolah berfungsi sebagai badan pertimbangan, yaitu komite sekolah ikut terlibat dan memberikan masukan

ketika pihak sekolah mengadakan program-program. Komite sekolah berfungsi sebagai badan pendukung, yaitu komite sekolah selalu mendukung program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Komite sekolah berfungsi sebagai badan pengontrol, yaitu komite sekolah secara konsisten memegang kendali atas keadaan sekolah. Komite sekolah berfungsi sebagai badan penghubung, yaitu komite sekolah berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.

### C. KINERJA SEKOLAH

Kinerja adalah sebuah pencapaian terhadap pelaksanaan rencana kegiatan ataupun kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditunjukkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Menurut Nur Alimah (dalam Hartomo dan Faza, 2022: 27) kinerja disebut dengan hasil atau prestasi atau tingkat keberhasilan kerja baik secara individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Husaeni Usman (dalam Hartomo dan Faza, 2022: 27), kinerja (*performance*) merupakan hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam bidang tugasnya. Lebih lanjut Haris (2016: 9) memaparkan bahwa kinerja diartikan sebagai tingkat atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar kompetensi yang dimilikinya. Istilah kinerja berkorelasi dengan bekerja karena kinerja itu hasil dari bekerja. Dalam konteks tersebut maka kinerja adalah hasil kerja/unjuk kerja (*performance*) dalam mencapai suatu tujuan atau persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tanggung jawab seseorang dalam menyelesaikan tugas yang di amanahi sesuai dengan

kompetensinya baik secara individu maupun kelompok.

Adapun ukuran kinerja menurut Mitchell (dalam Setiawan, 2021: 378) dapat diukur melalui:

1. Quality of work- kualitas hasil kerja
2. Promptness – ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan
3. Initiative – Prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan
4. Capability – kemampuan menyelesaikan pekerjaan
5. Comunication – kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain.

Beralih pada pengertian sekolah menurut Abdullah (dalam Wardani dan Lubis, 2021) kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yaitu skhhole, scola, scolae atau skhola yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah hal utama bagi anak dalam kegiatan – kegiatan diwaktu senggang yaitu bermain sebagai kegiatan mengisi waktu luang, menikmati masa kecil dan masa remaja. Sedangkan Prawiro (2018) memaparkan bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal, dan informal, dimana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal, dan informal, yang memberikan pengajaran terhadap siswa melalui bimbingan guru.

Merujuk pada penjabaran diatas maka kinerja sekolah menurut Sagala (dalam Hasibuan 2018:38) adalah “Manifestasi hasil karya yang dicapai oleh

suatu institusi. Ukuran keberhasilan suatu institusi mencakup seluruh kegiatan setelah melalui uji tuntas terhadap tujuan usaha yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.“ berdasar pengertian tersebut unsur penting yang ada dalam suatu kinerja sekolah adalah sebagai berikut:

1. Adanya institusi, baik berupa lembaga/sekolah atau pranata seperti system pengaturan
2. Adanya tujuan yang telah ditetapkan yang diusahakan pencapaiannya.
3. Adanya instrumen yang digunakan dalam pencapaian tujuan.

Peningkatan organisasi sekolah sangat mendukung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, oleh karena itu dalam organisasi sekolah diperlukan peningkatan pengelolaan pendidikan, dengan kata lain pengelolaan pendidikan yang berkualitas memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Peran top manager atau pimpinan organisasi sekolah dituntut untuk mengelola sekolah dengan sebaik mungkin. Sekarang ini pemimpin organisasi sekolah dituntut untuk profesional dalam penyelenggaraan pendidikan dan mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme. Tenaga profesional ini mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan undang-undang, diantaranya: meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi serta karier, meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan pelayanan pendidikan.

#### **D. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN**

1. Efektivitas Peran Komite Sekolah di SD Negeri Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal yang ditulis oleh Tri Yuningsih.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya data tentang Efektivitas Peran Komite Sekolah di SD Negeri Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut;

- a) Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu di SD Negeri 1 Kebumen secara keseluruhan dapat dikatakan efektif. Peran yang sudah efektif adalah peran Advisory Agency.
- b) Peran yang belum efektif di SD Negeri 1 Kebumen adalah peran yang tidak mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, mendorong masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendorong orang tua dan guru untuk membantu anak-anak mereka.
- c) Peran kontroling yang tidak efektif adalah meminta sekolah untuk menjelaskan hasil belajar siswa, mencari penyebab ketidakberhasilan siswa, dan memperkuat beberapa aspek keberhasilan siswa.

2. Efektivitas peran komite sekolah dalam peningkatan mutu yang ditulis oleh Arifin Juli 2022. Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya data tentang Efektivitas Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah yang efektif meningkatkan kualitas di SMP Negeri Satap 4 Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara.
- b) Komite sekolah yang efektif melakukan banyak hal. Ini termasuk berkolaborasi, memberikan saran dan koreksi, menerima dan menyampaikan keinginan, mengawasi kemajuan dana yang

dialokasikan, bernegosiasi, memberikan dukungan keuangan, memberikan dukungan pikiran dan tenaga, dan memberikan informasi kepada masyarakat.

c) Peran komite sekolah telah memperkuat kepemimpinan kepala sekolah dan keuangan sekolah serta meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

3. Efektivitas Kinerja Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Banjarsari yang ditulis oleh Sunardi 2017. Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya data tentang Efektivitas Kinerja Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Banjarsari, yaitu sebagai berikut;

a) Komite Sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari belum mencapai hasil yang baik sebagai lembaga penasihat. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan komite sekolah untuk menerapkan parameter indikator peran lembaga penasihat (advisory agency).

b) Komite Sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari gagal melaksanakan tugasnya sebagai badan pengontrol (controlling agency) karena belum memenuhi beberapa persyaratan.

c) Kinerja Komite Sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari sebagai penghubung telah berjalan dengan baik. Ini mencakup (1) menjadi penghubung antara masyarakat dan sekolah, (2) membantu sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan sekolah kepada orang tua siswa, dan (3) menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proposal kebijakan.

4. Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs Moti Verbond, Ternate 2023 yang ditulis oleh Fahmi Djaguna. Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya data tentang Peran Komite

Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs Moti Verbond, yaitu sebagai berikut;

a) Peran komite di MTs Moti Verbond sebagai mediator berjalan efektif meskipun banyak kekurangan.

b) Peran komite di MTs Moti Verbond sebagai pemberi pertimbangan telah berjalan dengan baik, dimana sekolah selalu memberikan sarana dan masukan pada saat rapat penting, seperti penyusunan RKAS.

5. Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Sekolah Dasar yang ditulis oleh Bambang Soepeno. Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya data tentang Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Sekolah Dasar, yaitu sebagai berikut;

a) Sebagian besar anggota komite sekolah (81%) telah memerankan tugasnya secara baik, sedangkan sisanya sebesar 19% masih memerlukan sosialisasi mengenai peran dan fungsinya sebagai anggota komite sekolah.

b) Kinerja Sekolah khususnya di SDN Kota Mataram secara umum sudah baik. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa aspek-aspek kinerja telah dapat dipenuhi secara memadai oleh persekolahan sesuai dengan SPM (Standat Pelayanan Mnimal)

c) Dari 4 (empat) peran utama komite sekolah sebagai mitra, hanya peran controlling yang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sekolah.

6. Efektivitas Komite Sekolah di SD Negeri 7 Bingin Teluk Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditulis oleh Zakaria April 2022 Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya data tentang Efektivitas Komite Sekolah di SD Negeri 7 Bingin Teluk Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

- a) Efektivitas Kinerja Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan mendukung program sekolah dan menampung aspirasi dari orang tua siswa.
  - b) Efektivitas Komite Sekolah dalam menumbuhkan komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu di SD Negeri 7 Bingin.
  - c) Efektivitas Komite sekolah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah untuk pendidikan yang bermutu di SD Negeri 7 Bingin.
  - d) Efektivitas Komite dalam memberi pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah tersebut untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu di SD Negeri 7 Bingin.
  - e) Efektivitas komite untuk mendorong masyarakat berpartisipasi untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu di SD Negeri 7 Bingin.
  - f) Efektivitas Komite Sekolah dalam mengawasi kebijakan program dan penyelenggaraan di sekolah untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu di SD Negeri 7 Bingin.
7. Aktualisasi Peran Dan Fungsi Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sebagai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang ditulis oleh Hj. Iis Suharti 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- a) Peran Komite Madrasah dalam memberi pertimbangan (*advisory agency*) terhadap penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada MAN Model.
  - b) Dukungan (*supporting*) baik berupa pemikiran, finansial, maupun

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di MAN Model menunjukkan adanya dukungan yang signifikan.

- c) Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol (*controlling*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di MAN Model.
- d) Sedangkan peran komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat, penulis dapat menyimpulkan belum seoptimal yang penulis harapkan. Hasil kemitraan tersebut belum sepenuhnya dapat mendorong tercapainya partisipasi masyarakat. Komite Madrasah belum menjadi kekuatan bagi manajemen pendidikan berbasis masyarakat sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.

#### **E. KERANGKA BERPIKIR**

Perubahan pemahaman terhadap pendidikan dengan berbasis sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh *stakeholder* mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Wadah partisipasi masyarakat melalui lembaga otonom yakni komite sekolah. Adanya pengelolaan kinerja sekolah antara guru, kepala sekolah, dan komite sekolah yang optimal akan mampu mempertimbangkan segala sesuatunya secara lebih terintegrasi. Serangkaian kata kunci indikator-indikator kinerja untuk yang dipaparkan sebelumnya akan diidentifikasi dan kemudian dimonitor pencapaiannya secara periodik. Melalui proses

pengelolaan kinerja yang komperhensif pada faktor inilah, sebuah sekolah mestinya bisa terus meningkat.

Peran kimitraan komite sekolah harus menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara sekolah dan komite sekolah dimana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Komite sekolah sebagai mitra sekolah harus berperan aktif dalam mendukung program sekolah. Komite sekolah merupakan bahan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Pembentukan komite sekolah bertujuan untuk; a). mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan program pendidikan dalam satuan pendidikan. b). meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. c). menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Kepala sekolah harus bertindak sebagai perantara atau mediator dalam perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Semua peran, fungsi, dan tugas tersebut saling terkait dan mempengaruhi kepala sekolah profesional. Dengan demikian, dapat mendorong visi menjadi kenyataan dalam paradigma baru manajemen pendidikan, yang akan menghasilkan kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas dan peningkatan motivasi kerja guru. Ini juga akan membantu menyelesaikan masalah produktivitas yang rendah di sekolah,

yang berkontribusi pada penurunan jumlah siswa yang bersekolah. Pendidik dan karyawan sekolah harus menyadari bahwa mendapatkan informasi baru dan mempertahankan kegiatan belajar adalah penting. Banyak factor yang mempengaruhi hal ini, seperti tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, dan cara sekolah diatur.

Sekolah merupakan sarana mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan penuh tanggung jawab agar mampu mencapai tujuan sebagai program pembangunan sumberdaya manusi melalui jalur pendidikan pada tiap jenis dan jenjang persekolahan. Tercapainya tujuan pada hakikatnya tergantung tingkat fungsinya seluruh komponen organisasi sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka diagram kerangka berfikir sebagai berikut:

